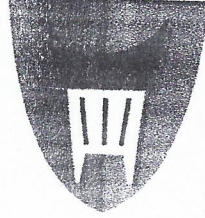


PESISIR SELATAN



**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

	Hal
BAB. I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	4
BAB II. Sekilas Tentang SPIP	5
A. Pengertian	5
B. Tujuan SPIP	6
C. Unsur-unsur SPIP	6
1. Lingkungan Pengendalian	6
2. Penilaian Resiko	7
3. Aktivitas Pengendalian	7
4. Informasi dan Komunikasi	8
5. Pemantauan Berkelanjutan	8
D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)	9
BAB III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan	10
Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik	10
Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini	10
Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	12
BAB IV. Risiko dan Kegiatan Pengendalian	16
A. Pernyataan Tujuan	16
B. Resiko-resiko	16
C. Pengendalian Terpasang	19
D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	22
BAB. V Informasi dan Komunikasi	23
BAB VI. Pemantauan dan Evaluasi	27
BAB VII. Penutup	29
Lampiran	30

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat menjadi SPIP adalah sebuah proses yang terintegrasi dilaksanakan oleh seluruh unsur dalam suatu lembaga yaitu pimpinan beserta seluruh pegawainya dengan konsisten dan terus menerus dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atas berjalannya kegiatan organisasi dengan efektif dan efisien, memiliki laporan keuangan yang dapat diandalkan, adanya sistem pengamanan aset yang memadai, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SPIP hendaknya dilaksanakan oleh organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah. Keandalan penyajian suatu laporan keuangan pemerintah dapat terwujud dengan menyelenggarakan SPIP dengan baik misalnya dengan menerapkan prosedur rekonsiliasi antara dua data transaksi keuangan yang dibuat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan yang dibuat oleh Bendahara Umum Negara ataupun daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 yang mengatur tentang SPIP mempertegas bahwa setiap entitas pelaporan dan akuntansi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengendalian intern. PP tersebut mengacu pada Konsep dari Committee of 2 Sponsoring Organizations (COSO) dalam mengatur kewajiban penyelenggaraan Pengendalian Internal.

SPIP diartikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Penamanan asset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Salah satu komponen penting dari unsur lingkungan pengendalian yang
dapat menimbulkan perilaku positif

dan kondusif adalah dengan adanya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Wujud nyata dari peran APIP yang efektif yaitu dengan adanya dukungan dari APIP tersebut bahwa instansi pemerintah dapat melaksanakan kegiatan dengan mengutamakan asas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas. APIP juga harus berperan nyata yaitu dengan mengingatkan dan memberikan peringatan dini apabila ada risiko yang sekiranya dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan kegiatan suatu instansi pemerintah serta dapat meningkatkan dan memelihara kualitas tata kelola fungsi dari instansi pemerintah tersebut terutama berkaitan dalam hal perwujudan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tolok ukur keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dimana masyarakat meyakini bahwa pemerintah dapat mempertanggungjawabkan seluruh dana yang dipercayakan kepada mereka sehingga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penerapan SPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat sehingga diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

II. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

III. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta mengkomunikasikan dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir selatan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Menjadi dasar dalam membangun dan mengimplementasi pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP, serta dasar pemantauan yang berkelanjutan.

IV. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPI dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu"irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;

- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. *Penilaian Risiko*

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

3. *Aktivitas Pengendalian*

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian

yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. *Informasi dan Komunikasi*

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. *Pemantauan Berkelanjutan*

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti.

Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang

diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif;
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas

diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan (4 bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan,

lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan)

		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

		Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2020, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Repormasi Bkirokrasi Dengan Aparatur Yang bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga berencana lestari
2. Meningkatkan Peran Struktur sosial Dalam rangka mengurangi tindak kejahatan, Kriminalitas dan peredaran obat obatan terlarang dengan tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Nagari

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

- Berkurangnya keluarga yang berkualitas.

Risiko atas pencapaian tujuan 2:

- Berkurangnya capaian peserta KB aktif.

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

- Terlambatnya proses pengadaan sarana dan prasarana program KKBPK.

Risiko atas pencapaian tujuan 4:

- Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)

Risiko atas pencapaian tujuan 5:

- Terlambatnya proses pengadaan sarana dan prasarana program KKBPK

Risiko Pencapaian Tujuan 6:

- Akan berdampak kurangnya kapasitas wali nagari.

Risiko atas pencapaian tujuan 7:

- Tidak terlaksananya tertib Adminitrasi pada Pemerintahan nagari.

Risiko atas Pencapaian Tujuan 8:

- Kurang optimalnya Pelaksanaan Pemilihan Wali nagari dan Bamus Nagari

Risiko atas Pencapaian Tujuan 9:

- Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Risiko Pencapaian Tujuan 10:

- Akan kurangnya kapasitas Badan Usaha Milik Nagari.

Risiko Pencapaian Tujuan 11:

- Lambatnya Pembangunan di dalam Kawasan Perdesaan.

Risiko atas pencapaian tujuan 12:

- Berkurangnya kapasitas wali nagari, BP SPAM dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia
berkurangnya kapasitas wali nagari, BP SPAM dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.

Risiko atas pencapaian tujuan 13:

- Akan berkurangnya partisipasi kader/pengurus PKK.

Risiko Pencapaian Tujuan 14:

Kurang optimalnya pelaksanaan Tentara Masuk Nagari

Risiko atas pencapaian tujuan 15:

- Akan Berkurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

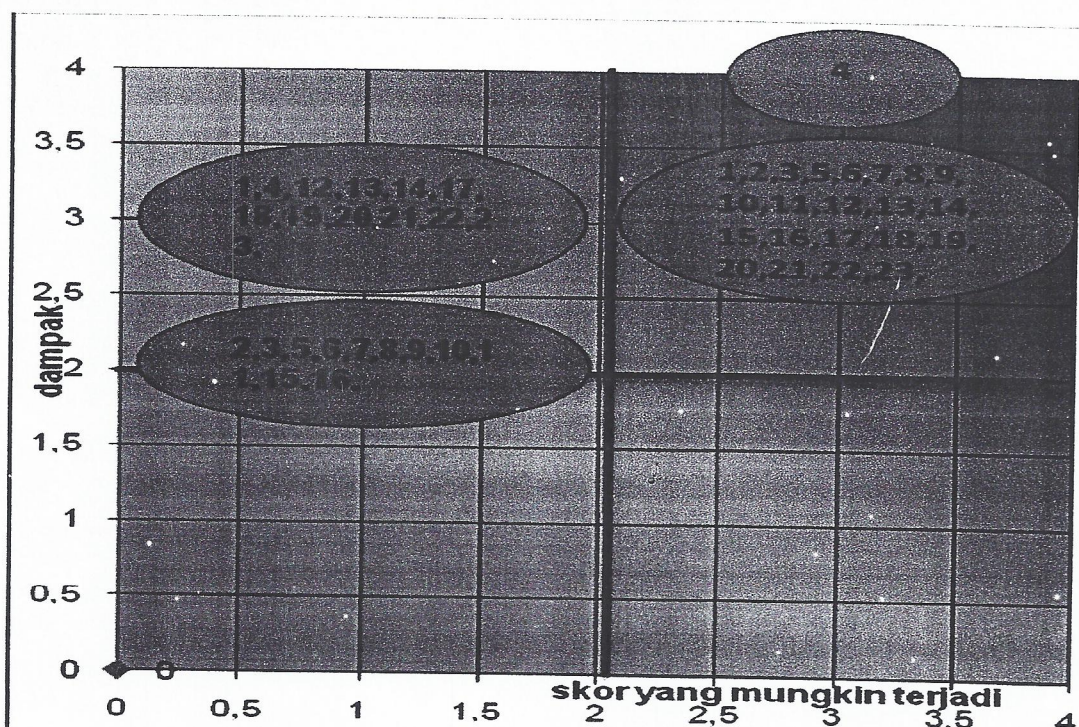
Risiko Pencapaian Tujuan 16:

- Lemah dan tidak berdayanya 182 Lembaga Pemerintah Nagari dalam Pencanaan dan Penilaian Bulan Bhakti Gontong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten

Risiko Pencapaian Tujuan 17:

- Lemah dan tidak berdayanya 182 Lembaga Pemerintah Nagari dalam perolehnya Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Propinsi

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah

Tingkat II : Level risiko rendah

Tingkat III : Level risiko tinggi

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi

Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
 1. Monitoring dan Evaluasi.
 - b. Bhakti KB Kes IBI/IDI/TNI/Bahayangkara/PKK dan Jambore
 1. Pelayanan MKJ (MOP, MOW, IUD dan Implant) di Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana program KKBPK
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
 - d. Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
 - e. Operasional Pergerakan Kampung Keluarga Berencana
 1. Pelaksanaan Pergerakan di kampung KB di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
 - f. Penyediaan Komunikasi, Informasi dan edukasi
-

1. Pelaksanaan pengadaan media media informasi berupa pengadaan media informasi dalam ruangan dan luar ruangan
- g. Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana
 1. Pelaksanaan pembinaan Kader Kader KB dan monitoringnya
- h. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga berencana (DAK Fisik)
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
- i. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga berencana (Penunjang DAK Fisik)
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
- j. Pemilihan Duta Gendre
 1. Terlaksananya pelaksanaan pemilihan duta gendre tingkat kabupaten pessel dan mengikuti pemilihan duta gendre tingkat propinsi
- k. Grand design Pembangunan Kependudukan
 1. Tersedianya Data GDPK
- l. Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali nagari
 1. Sosialisasi, pembinaan, Pemilihan PAW Bamus Nagari 12 Bamus
- m. Pembinaan Keuangan nagari
 1. Sosialisasi pembinaan dan Monitoring keuangan 103 Nagari serta penambahan SDM
- n. Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati
 1. Terlaksananya penyusunan regulasi Nagari tentang pengelolaan pemerintahan Nagari dan Revisi Perda tentang pemerintahan Nagari
 2. Sosialisasi dan evaluasi
- o. Pengawasan dan Penanganan Masalah Nagari
 1. Rapat, monitoring, evaluasi
 2. Menyelesaikan masalah masalah konflik nagari

3. Koordinasi dengan TIM dalam Penyelesaian kasus kasus nagari
- p. Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari
 1. Terlaksananya Pelatihan Aparatur Nagari tentang tata kelolah keuangan dan pengelolaan administrasi Nagari
- q. Pembinaan dan pelatihan Bumrag dan Lembaga ekonomi masyarakat Nagari
 1. Pelatihan BinteK, Monitoring dan evaluasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari Pelatihan BinteK, Monitoring dan evaluasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari
- r. Pembinaan Potensi Kawasan masyarakat perdesaan/nagari
 1. Sosialisasi dan Pembinaan kawasan
- s. Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan tim penggerak PKK
 1. Pelatihan, sosialisasi, binteK, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi
- t. Kegiatan Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Nagari
 1. Sosialisasi regulasi Tentang Desa, Rakor Camat dan Pendamping Desa dan penyusunan RPJM Nagari yang Walinagari Baru dilantik dan RKP Nagari
- u. Kegiatan Pencanaan dan Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten
 1. Pencanaan BBGRM tingkat Kabupaten Pessel dan Moniyoring Pelaksanaan BBGRM di Kabupaten Pesisir Selatan
- v. Pemuthakiran Data profil dan IDM Nagari
 1. Koordinasi dan Rapat rapat dengan Nagari
 2. Penyusunan IDM Nagari
 3. Pendataan Data data dalam menyusun IDM dan Profil Nagari
- w. Pembinaan Lembaga adat dan sosialisasi Lainnya
 1. Pembinaan KAN
 2. Sosialisasi Pembentukan Nagari Asdat di kecamatan Lengayang

- x. Pembinaan Posyandu integrasi
 - 1. Terlaksananya pembinaan posyandu integrasi di kabupaten pesisir selatan
- y. Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten
 - 1. Mengikuti Perlombaan Nagari tingkat Propinsi dan Pelaksanaan Lomba Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

- 1. Supervisi/pembinaan OPD
- 2. Peningkatan kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat
- 3. Juknis Kegiatan
- 4. SOP pengadaan, Evaluasi Renja dan Renstra

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah: berikut :

- Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
 1. Monitoring dan Evaluasi.
 - Bhakti KB Kes IBI/IDI/TNI/Bahayangkara/PKK dan Jambore
 1. Pelayanan MKJ (MOP, MOW, IUD dan Implant) di Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat
 - Pengadaan sarana dan prasarana program KKBPK
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
 - Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
 - Operasional Pergerakan Kampung Keluarga Berencana
 1. Pelaksanaan Pergerakan di kampung KB di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
 - Penyediaan Komunikasi, Informasi dan edukasi
 1. Pelaksanaan pengadaan media media informasi berupa pengadaan media informasi dalam ruangan dan luar ruangan
-

- Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana
 1. Pelaksanaan pembinaan Kader KB dan monitoringnya
- Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga berencana (DAK Fisik)
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
- Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga berencana (Penunjang DAK Fisik)
 1. Koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB
- Pemilihan Duta Gendre
 1. Terlaksananya pelaksanaan pemilihan duta gendre tingkat kabupaten pessel dan mengikuti pemilihan duta gendre tingkat provinsi
- Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
 1. Terlaksananya Penyusunan Dokumen GDPK
- Fasilitas Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali nagari
 1. Sosialisasi, pembinaan, Pemilihan PAW Bamus Nagari 12 Bamus
- Pembinaan Keuangan nagari
 1. Sosialisasi pembinaan dan Monitoring keuangan 103 Nagari serta penambahan SDM
- Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati
 1. Terlaksananya penyusunan regulasi Nagari tentang pengelolaan pemerintahan Nagari dan Revisi Perda tentang pemerintahan Nagari
 2. Sosialisasi dan evaluasi
- Pengawasan dan Penanganan Masalah Nagari
 1. Rapat, monitoring, evaluasi
 2. Menyelesaikan masalah masalah konflik nagari
 3. Koordinasi dengan TIM dalam Penyelesaian kasus kasus nagari
- Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari
 1. Terlaksananya Pelatihan Aparatur Nagari tentang tata kelola keuangan dan pengelolaan administrasi Nagari
- Pembinaan dan pelatihan Bumrag dan Lembaga ekonomi masyarakat Nagari

1. Pelatihan BinteK, Monitoring dan evaluasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari Pelatihan BinteK, Monitoring dan evaluasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari
 - Pembinaan Potensi Kawasan masyarakat perdesaan/nagari
 1. Sosialisasi dan Pembinaan kawasan
 - Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan tim penggerak PKK
 1. Pelatihan, sosialisasi, binteK, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi
 - Kegiatan Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Nagari
 1. Sosialisasi regulasi Tentang Desa, Rakor Camat dan Pendamping Desa dan penyusunan RPJM Nagari yang Walinagari Baru dilantik dan RKP Nagari
 - Kegiatan Pencanaan dan Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten
 1. Pencanaan BBGRM tingkat Kabupaten Pessel dan Moniyoring Pelaksanaan BBGRM di Kabupaten Pesisir Selatan
 - Pemuthakiran Data profil dan IDM Nagari
 1. Koordinasi dan Rapat rapat dengan Nagari
 2. Penyusunan IDM Nagari
 3. Pendataan Data data dalam menyusun IDM dan Profil Nagari
 - Pembinaan Lembaga adat dan sosialisasi Lainnya
 1. Pembinaan KAN
 2. Sosialisasi Pembentukan Nagari Asdat di kecamatan Lengayang
 - Pembinaan Posyandu integrasi
 1. Terlaksananya pembinaan posyandu integrasi di kabupaten pesisir selatan
 - Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten
 1. Mengikuti Perlombaan Nagari tingkat Propionsi dan Pelaksanaan Lomba Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
-

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.

Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh kegiatan SKPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Painan, 27 Februari 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WENDI, SH., M.Hum
NIP. 19760407 199803 1 005

Identifikasi Tujuan Strategis

Visi : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA"

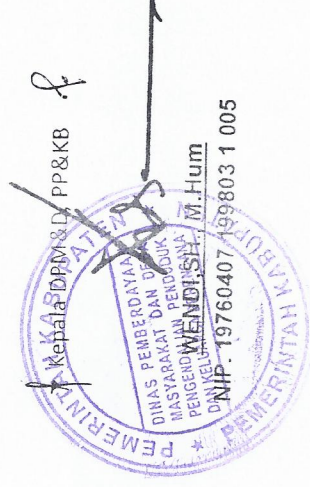
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5
1	"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA"	Terwujudnya Keluarga Berencana Lestari	Meningkatkan kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK Fisik)
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (Penunjang DAK Fisik)
				Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK NON Fisik)
				Operasional Pergerakan Kampung KB (DAK NON Fisik)
				Penyediaan Media Komunikasi, informasi dan edukasi (DAK NON Fisik)
				Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana (DAK NON Fisik)
				Membangun Jaringan Kemitraan dengan institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
				Pemilihan Duta Gendre
				Pembinaan Kampung KB
				Tersedianya data GDPK
				Bhakti TNI Kes IB/IDI/TNI/Bhayangkara/PKK dan Jambore
				Fasilitasi Pemekaran, Pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari
				Pembinaan Keuangan Pemerintahan Nagari

				Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
				Pengawasan dan penanganan masalah desa
				Fasilitasi dan pembinaan RPJM dan RKP Nagari
				Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD)
				Pelatihan aparatur tentang manajemen pemerintahan Nagari
				Fasilitasi penetapan dan penanganan tapal batas nagari
				Pemuthakiran data profil dan IDM Nagari
			Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Nagari	Pembinaan dan Pelatihan Bumrag dan lembaga ekonomi masyarakat
				Pembinaan badan kerjasama Nagari
				Pembinaan dan pembentukan posyantek dan gelar TTG
				Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari
			Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	Pelatihan dan pembinaan lembaga pemberdayaan Nagari
				Pencanangan dan Penilaian Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten
				Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten
				Pemberdayaan Kelembagaan PKK Kabupaten
				Pemberdayaan Kelembagaan posyandu integrasi
				Pembinaan lembaga adat dan sosial lainnya

Catatan:

Uraian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
4. Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dengan dokumen renstra
5. Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis



Control Self Assessment (CSA)

Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselaran dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	selaras	
2	Bhakti KB Kes IBI/TNI/PKK dan Jambore	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI,TNI,PKK)	selaras	
3	Pengadaan sarana dan prasarana program KKBPK	Tersedianya sarana prasarana program KKBPK	selaras	
4	Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI,TNI,PKK)	selaras	
5	Operasional Pergerakan Kampung KB(DAK NON Fisik)	Terlaksananya Pergerakan kampung KB	selaras	
6	PenyediaanMedia Komunikasi, informasi dan edukasi (DAK NON Fisik)	Terlaksananya KIE	selaras	
7	Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana (DAK NON Fisik)	Terlaksananya pembinaan Kader KB	selaras	
8	Grad Desaign Pembangunan Kependudukan	Tersedianya Dokumen GDPK	selaras	
9	Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali nagari	Terpilihnya Bamus Nagari PAW	selaras	
10	Pembinaan Keuangan Pemerintahan nagari	Tertibnya Adminitrasi Pemerintah Nagari	selaras	
11	Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati	Tersedianya regulasi tentang pemerintahan Nagari	selaras	
12	Pengawasan dan penanganan masalah desa	Terselesaikannya masalah masalah yang ada di nagari	selaras	
13	Fasilitasi dan pembinaan RPJM dan RKP Nagari	Tersedianya RKP Nagari	selaras	

14	Pelatihan aparatur tentang manajemen pemerintahan Nagari	Terlatihnya aparatur nagari	selaras	
15	Fasilitasi penetapan dan penanganan tapal batas nagari	Terukurnya tapal batas masing masing Nagari	selaras	
16	Pembinaan dan Pelatihan Bumhag dan lembaga ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari	selaras	
17	Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari	terlaksananya rapat koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan(PKP)	selaras	
18	Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan tim penggerak PKK	Berdayanya lembaga TP PKK Kabupaten dengan jalan pembinaan PKK Kecamatan,Dasa wisma, posyandu,HKG PKK dan UP2K	selaras	
19	Kegiatan Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Nagari	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	selaras	
20	Kegiatan Pencanangan dan Penilaian Bulan Bhakti Gontong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Nagari dan terlaksananya Penilaian dan Pencanangan dan Penilaian BBGRM Serta HKG PKK Tk.Kabupaten,Provinsi dan Nasional	selaras	
21	Perlombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten	Terlaksananya dan diperolehnya Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Propinsi	selaras	
22	Pembinaan Posyandu integrasi	Terlaksananya Pembinaan Posyandu	selaras	
23	Pembinaan lembaga adat dan sosila lainnya	Terlaksananya sosialisasi nagari adat dan pembinaan KAN	selaras	

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan atas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)



IDENTIFIKASI RISIKO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

SKPD SKPD:

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Penilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi
1		2	3	4	5	6	7
1	Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan	Terselenggaranya keluarga yang berkualitas	akan berdampak kurangnya keluarga yang berkualitas	BKKBN, Bidang PP dan KB, PKB/PLKB	Anggaran dan SDM	berkurangnya keluarga yang berkualitas	3,00
2	Bhakti KB Kes IB/TNI/PKK dan Jambore	Terselenggaranya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (B, TNI, PKK)	Kurangnya ketersediaan alat/obat kontrasepsi serta obat penanganan efek samping pelayanan KB	BKKBN, Bidang PP dan KB	Ketersediaan alat/obat kontrasepsi dan side effect di BKKBN perwakilan Propinsi terlambatnya petunjuk operasional DAK	Berkurangnya capaian peserta KB aktif	3,00
3	Pengadaan sarana dan prasarana program KBPK	Tersedianya sarana prasarana program KBPK	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana program KBPK	BKKBN, Bidang PP dan KB	terlambatnya petunjuk operasional Dana BOKB	terlambatnya proses pengadaan sarana dan prasarana program KBPK	3,00
4	Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Terselenggaranya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (B, TNI, PKK)	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana	BKKBN, Bidang PP dan KB, PKB/PLKB	terlambatnya petunjuk operasional Dana BOKB	Terlambatnya proses pengadaan sarana dan prasarana program KBPK	4,00
5	Operasional Pergerakan Kampung KB (DAK NON Fisik)	Terselenggaranya pergerakan kampung KB	Kurang optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pergerakan kampung KB	BKKBN, Bidang KB PP dan KB, OLKB/PKB	Kurangnya pergerakan kader dan kampung KB	Terlambatnya proses pembangunan kampung KB	3,00
6	Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (DAK NON Fisik)	Terselenggaranya KIE	Kurang optimalnya media Komunikasi Informasi Edukasi	BKKBN, Bidang KB PP dan KB, OLKB/PKB	Kurangnya sosialisasi tentang program program KB	Terlambatnya proses pelayanan KB dan menukurnya pelayanan KB	3,00
7	Operasional Pembinaan Kader keluarga Berencana (DAK NON Fisik)	Terselenggaranya Pembinaan Kader KB	Kurang optimalnya pembinaan kader KB	BKKBN, Bidang KB PP dan KB, OLKB/PKB	Kurangnya sosialisasi tentang program program KB	Terlambatnya proses pelayanan KB dan menukurnya pelayanan KB	3,00
8	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana	Terselenggaranya Penunjang pengadaan sarana prasarana di DAK Fisik KB	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana program KBPK	BKKBN, Bidang PP dan KB	Terlambatnya petunjuk operasional DAK	Terlambatnya proses pengadaan sarana dan prasarana program KBPK	3,00
9	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana	Terselenggaranya pengadaan sarana prasarana di DAK Fisik KB	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana program KBPK	BKKBN, Bidang PP dan KB	Terlambatnya petunjuk operasional DAK	Terlambatnya proses pengadaan sarana dan prasarana program KBPK	3,00
10	Pemilihan Duta Gendire	Terselenggaranya Pemilihan Duta Gendire	Kurang optimalnya pemilihan Duta Gendire	BKKBN, Bidang PP dan KB	Kurang sosialisasi Pemilihan Duta Gendire	Terlambatnya proses pemilihan Duta Gendire	3,00

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Grad Desain Pembangunan Kependudukan	Tertulisannya Penyusunan Dokumen GDPK	Kurang Penyusunan Dokumen GDPK	BKKB, Bidang PP dan KB	Kurangnya tersedianya data penyusunan GDPK	kurang pahaminya tentang data data penyusunan GDPK			
12	Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali nagari	Terjalinnya Wali dan Bamus Nagari 2018-2022	Kurang optimalnya Pelaksanaan Pemilihan Wali nagari dan Bamus Nagari	Bidang Nagari, Bamus dan Wali Nagari	Anggaran dan SDM	Tidak terlasarnya pemilihan Wali dan Bamus Nagari	3,00	2,00	5,00
13	Pembinaan Keuangan Pemerintahan nagari	Tertibnya Administrasi Pemerintahan Nagari	kurangnya ketersediaan dana serta masih kurangnya SDM Perangkat Nagari yang mengakibatkan pembinaan dan monitoring nagari dalam pelaksanaan pembinaan tertibnya administrasi Pemerintahan nagari akan terkendala	Bidang Nagari dan Nagari sekab, Pes, Sel.	ANGGARAN dan SDM	Kurang tertibnya Administrasi di Pemerintahan Nagari	3,00	3,00	6,00
14	Penyusunan Raperda dan Peraturan Bupati	Tersedianya regulasi Pemerintahan Nagari	Kurang optimal pelaksanaan pemerintahan Nagari	Bidang Nagari dan Nagari sekab, Pes, Sel.	Petunjuk operasional penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Kurang tertibnya Administrasi di Pemerintahan Nagari	3,00	3,00	6,00
15	Pengawasan dan penanganan masalah di Nagari	Tertaksananya masalah masalah yang ada di Nagari	Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Bidang Nagari dan Nagari sekab, Pes, Sel.	ANGGARAN dan SDM	Kurang tertibnya Administrasi di Pemerintahan Nagari	3,00	3,00	6,00
16	Pembinaan dan Pelatihan Bumhag dan lembaga ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari	akan berdampak kurangnya kapasitas Badan Usaha Milik Nagari	Bidang Pemberdayaan SDA, UEM dan PKP	SDM dan Anggaran	berkurangnya kapasitas Badan Usaha Milik Nagari	3,00	2,00	5,00
17	Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Perdesaan/Nagari	terlaksananya rapat koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	akan mengakibatkan tidak terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Badan Kerjasama Anta Nagari	Kasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kabis Perdesaan dan PKP	Anggaran	lambatnya Pembangunan di dalam Kawasan Perdesaan	3,00	2,00	5,00
18	Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan tim penggerak PKK	Berdanya lembaga TP PKK Kabupaten dengan jalan pembinaan PKK Kecamatan, Desa, posyandu, PKG dan UP2K	akan berdampak pada partisipasi kader/pengurus PKK	Kasi kelembagaan adat dan sosbud	SDM	akan berkurangnya partisipasi kader/pengurus PKK	3,00	3,00	6,00
19	Kegiatan Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Nagari	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Akan Berdampak Kepada Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	Kasi Kelembagaan Masyarakat	SDM	Akan Berkurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	3,00	3,00	6,00
20	Kegiatan Perencanaan dan Penilaian Bulan Bhakti Gongkong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Nagari dan terlaksananya Penilaian dan Perencanaan dan Penilaian BBGRM Serta HKG PKK Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Akan Berdampak Kepada Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Nagari dan dalam melaksanakan Penilaian dan Perencanaan dan Penilaian BBGRM Serta HKG PKK Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Kasi Partisipasi Masyarakat	SDM	Lenah dan tidak berdayanya 182 Lembaga Pemerintah Nagari dalam Perencanaan dan Penilaian Bulan Bhakti Gongkong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten	3,00	3,00	6,00

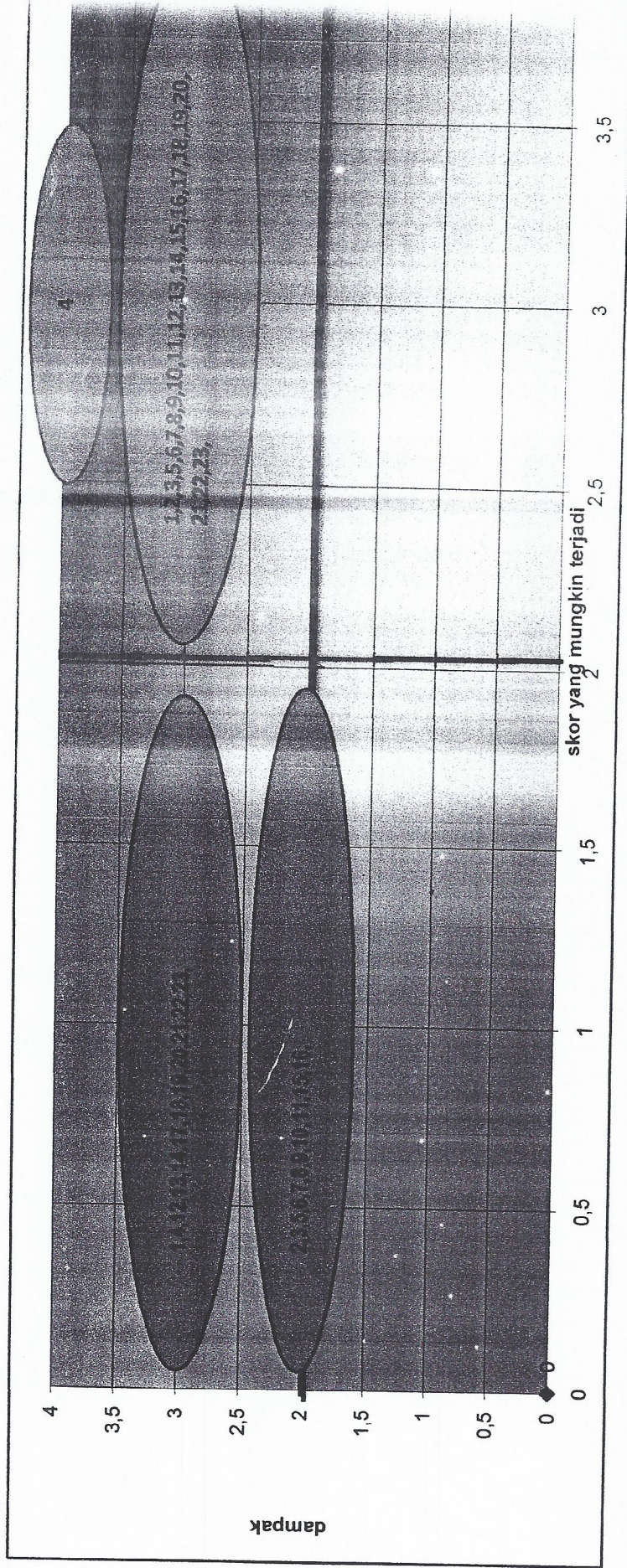
No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Skor Akhir (7x6)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
21	Perombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten	Terlaksananya dan diperolehnya Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Akan berdampak kepada 13 Nagari Sebagai Wakil Nagari Berprestasi Tk. Kecamatan	Kasi Partisipasi Masyarakat	SDM	Lemah dan tidak berdayanya 182 Lembaga Pemerintah Nagari dalam perolehnya Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Propinsi	3,00	3,00	6,00
22	Pembinaan Poyandu Integrasi	Terlaksananya Pembinaan Poyandu	akan berdampak kepada kurang aktifnya poyandu integrasi	Bidang lembaga	SDM	lemah dan tidak berdayanya Poyandu integrasi	3,00	3,00	6,00
23	Pembinaan lembaga adat dan sosila lainnya	Terlaksananya sosialisasi nagari adat dan pembinaan KAN	akan bertampak kepada pembinaan KAN dan sosialisasi Nagari Adat	Bidang lembaga	SDM	Lemah dan tidak berdayanya KAN dan tidak terbentuk Nagari Adat	3,00	3,00	6,00

Ket:

- Kolom 1 berisi no. urut
- Kolom 2 berisi uraian tujuan yang diidentifikasi
- Kolom 3 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- Kolom 4 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
- Kolom 5 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko (fasilitator agar mengarahkan peserta diskusi untuk mengaitkan risiko dengan lingkungan pengendalian)
- Kolom 6 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi



PETA RISIKO



Keterangan:

Tingkat I : Level risiko sangat rendah

Tingkat II : Level risiko rendah

Tingkat III : Level risiko tinggi

Tingkat IV : Level risiko sangat tinggi



RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas	akan berdampak kurangnya keluarga yang berkualitas	tersedianya anggaran dan SDM	mengalokasikan dana di RKA	Belum Efektif	Pelatihan Bimtek, Monitoring dan Evaluasi	Bidang PP & KB	Feb - Des 2019
2	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	Kurangnya ketersediaan alat/obat kontrasepsi serta obat penangan efek samping pelayanan KB	Tersedianya alat/obat kontrasepsi dan side effect di Dinas PMDPP&KB Kab.Pessel	berkoordinasi dengan FKTP untuk penggunaan sementara obat di gudang FKTP	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Bidang PP & KB	Mei - Oktober 2019
3	Tersedianya sarana prasarana program KKBPK	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana program KKBPK	tersedianya petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	penggunaan petunjuk operasional tahun sebelumnya	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	Maret - Juli 2019
4	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana.	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	penggunaan petunjuk operasional tahun sebelumnya	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	Maret - Juli 2019
5	Terlaksananya penggerakan kampung KB	Kurang optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pergerakan kampung KB	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	penggunaan petunjuk operasional tahun sebelumnya	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	1 tahun

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Terlaksananya KIE	Kurang optimalnya media Komunikasi Informasi Edukasi	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	penggunaan petunjuk operasional tahun sebelumnya	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	1 tahun
7	Terlaksananya Pembinaan Kader KB	Kurang Optimalnya pembinaan kader KB	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	penggunaan petunjuk operasional tahun sebelumnya	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	1 tahun
8	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana di DAK Fisik KB	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana program KKBPK	ketersediaan petunjuk operasional sebelum tahun pelaksanaan kegiatan	penggunaan petunjuk operasional tahun sebelumnya	Kurang Efektif	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	Maret - Juli 2019
9	Terpilihnya Wali Nagari dan Bamus Nagari	Kurangnya Kesiediaan dana untuk mendukung pemilihan Wali Nagari Dan Bamus	tersedianya anggaran	pengalokasian dana di RKA	kurang efektif	Sosialisasi dan pembinaan	Bidang Nagari	September /Desember
10	Terlaksananya Pemilihan Duta Gendre	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana prasarana program KKBPK	terlaksananya sosialisasi Pemilihan Duta Gendre	pengalokasian dana di RKA	kurang efektif	Sosialisasi dan pembinaan	Bidang Nagari	Januari- April
11	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	Kurang optimalnya pemilihan Duta Gendre	terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi remaja	pengalokasian dana di RKA	kurang efektif	Sosialisasi dan pembinaan	Bidang Nagari	Januari- september
12	Terpilihnya PAW Bamus Nagari	Kurang optimalnya Pelaksanaan PAWBamus Nagari	terlaksananya PAW Bamus Yang mundur akibat Pemilu	pengalokasian dana di RKA	kurang efektif	Sosialisasi dan pembinaan	Bidang Nagari	Januari- september
13	Pembinaan Keuangan Pemerintahan nagari	Kurangnya ketersediaan dana mengakibatkan pembinaan dan monitoring Pemerintahan nagari akan menjadi terkendala.	tersedianya anggaran	pengalokasian dana di RKA	kurang efektif	Sosialisasi ,pembinaan dan Monitoring serta penambahan SDM	Bidang Nagari	Januari- Desember

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Terlaksananya Permasalahan Pemerintahan Nagari	Terlaksananya penyelesaian konflik di nagari	tersedianya anggaran	pengalokasian dana di RKA	kurang efektif	Pembinaan dan Monitoring	Bidang Nagari	Januari- Desember
15	Tersedianya Regulasi Pemerintahan	Kurang Optimalnya pelaksanaan Pemerintahan Nagari	tersedianya anggaran	pengalokasian dana di RKA	kurang efektif	Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring	Bidang Nagari	Januari- Desember
16	Meningkatnya Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari	akan berdampak kurangnya kapasitas Badan Usaha Milik Nagari	meningkatnya kapasitas Badan Usaha Milik Nagari	tersedianya anggaran dan SDM	belum efektif	Pelatihan Bimtek, Monitoring dan evaluasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari	Bidang Pemberdayaan SDA, UEM dan PKP	Januari s/d Desember
17	terlaksananya rapat koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan(PKP)	akan mengakibatkan tidak terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Badan Kerjasama Antar Nagari	tersedianya anggaran dan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	mengalokasikan dana di RKA	belum efektif	sosialisasi dan Pembinaan	Kasi PKP dan Pemberdayaan SDA, UEM dan PKP	Januari s/d Desember
18	Berdanya lembaga TP PKK Kabupaten dengan jalan pembinaan PKK Kecamatan,Dasa wisata, posyandu,HKG PKK dan UP2K	akan berdampak pada partisipasi kader/pengurus PKK	tersedianya SDM	mengalokasikan dana di RKA	kurang efektif	pelatihan,sosialisasi, bimtek, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	kasi kelembagaan adat dan sosbud	1 th anggaran
19	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Akan Berdampak Kepada Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	tersedianya SDM	mengalokasikan dana di RKA	kurang efektif	pelatihan,sosialisasi, bimtek, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	Kasi Kelenbagaan Masyarakat	1 th anggaran
20	Meningkatnya Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Nagari dan terlaksananya Penilaian dan Pencanangan dan Penilaian BBGRM Serta HKG PKK Tk. Kabupaten,Provinsi dan Nasional	Akan Berdampak Kepada Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Nagari dan dalam melaksanakan Penilaian dan Pencanangan dan Penilaian BBGRM Serta HKG PKK Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	tersedianya SDM	mengalokasikan dana di RKA	kurang efektif	pelatihan,sosialisasi, bimtek, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	Kasi Partisipasi Masyarakat	1 th anggaran
21	Terlaksananya dan diperolehnya Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Akan Berdampak kepada 15 Nagari Sebagai Wakil Nagari Berprestasi Tk. Kecamatan	tersedianya SDM	mengalokasikan dana di RKA	kurang efektif	pelatihan,sosialisasi, bimtek, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	Kasi Partisipasi Masyarakat	1 th anggaran
22	Terlaksananya Pembinaan Posyandu	akan berdampak kepada kurang aktifnya posyandu integrasi	tersedianya SDM	mengalokasikan dana di RKA	kurang efektif	pelatihan,sosialisasi, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	Bidang Kelembagaan	1 th anggaran

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Terlaksananya sosialisasi nagari adat dan pembinaan KAN	akan bertampak kepada pembinaan KAN dan sosialisasi Nagari Adat	tersedianya SDM	mengalokasikan dana di RKA	kurang efektif	sosialisasi, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	Bidang Kelembagaan	1 th anggaran

Ket:

- Kolom 1 Disi dengan nomor urut
Kolom 2 Disi uraian risiko yang diidentifikasi
Kolom 3 Disi dengan Pengendalian yang harus ada atas Risiko
Kolom 4 Disi Pengendalian yang sudah ada
Kolom 5 Disi Efektivitas Pengendalian yang ada
Kolom 6 Disi Pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom 7 Disi dengan nama Penanggungjawab untuk pengendalian
Kolom 8 Disi dengan rencana waktu pelaksanaan perbaikan pengendalian



DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

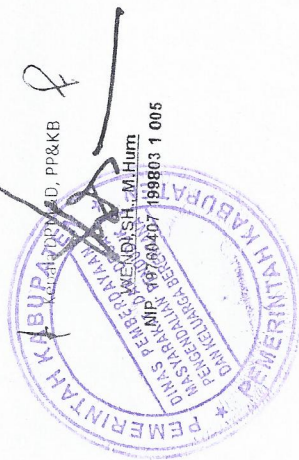
No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
				Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	diambil dari Kolom 2 (tujuan yang diidentifikasi) sheet 7. infokom	isikan sesuai dengan pengendalian yang masih dibutuhkan (Kolom 7) dalam sheet 6. Keg pengendalian	Sudah ada / belum oleh atasan langsung/APIP/tim khusus	Pilih : Pemantauan berkelanjutan / Evaluasi Terpisah / Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan revaluasi lainnya	untuk pemantauan berkelanjutan oleh Atasan Langsung; untuk Evaluasi Terpisah dan/atau Pemantauan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi hasil audit dan revaluasi lainnya oleh APIP (Inspektoral/ BPK/ BPKP)	7	dapat diisi setelah dilakukan pemantauan, apabila masih terdapat kelemahan atau kekurangan dari kegiatan pengendalian terpantau
1	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas	Pelatihan Bimtek, Monitoring dan Evaluasi	sudah ada	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	OPD, Provinsi, Pusat dan Tim kompetensi	Jan - Des 2020	Pembinaan dan Penambahan Anggaran
2	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	sudah ada	komunikasi berkelanjutan dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat serta pengiriman data peserta KB aktif dan PUS	Tim SIDUGA dan DPMDPP&KB	setiap bulan	pengajuan penyediaan dana alat/obat pelayanan kontrasepsi dari APBD, serta bagi PUS unmet need diajukan untuk kontak
3	Tersedianya sarana prasarana program KBPK	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	sudah ada	pengumpulan informasi online melalui web sakura BKKBN Pusat	Tim anggaran DPMDPP&KB	Bulan November-Desember 2020	pengajuan usulan pengadaan DAK fisik melalui e planning
4	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	sudah ada	pengumpulan informasi online melalui web sakura BKKBN Pusat	Tim anggaran DPMDPP&KB	Bulan November-Desember 2020	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran
5	Terlaksananya penggerakan kampung KB	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	sudah ada	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Tim anggaran DPMDPP&KB	Bulan November-Desember 2020	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran
6	Terlaksananya KIE	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	sudah ada	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Tim anggaran DPMDPP&KB	Bulan November-Desember 2020	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran

7) Terlaksananya Pembinaan Kader KB	koordinasi dengan BKJN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	sudah ada	Pembinaan, monitoring dan evaluasi	Tim anggaran DPMDPP&KB	Bulan November-Desember 2020	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran
8) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana di DAK Fisik KB	koordinasi dengan BKJN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	sudah ada	pengumpulan informasi online melalui web sakura BKKBN Pusat	Tim anggaran DPMDPP&KB	Bulan November-Desember 2020	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran
9) Terpilihnya Wali Nagari	Sosialisasi dan pembinaan nagari	sudah ada	monitoring dan evaluasi	Bidang Pemerintahan Nagari	Januari s/d Desember	Pembinaan oleh OPD tim dan penyediaan anggaran
10) Terlaksananya Pemilihan Duta Gendre	Sosialisasi dan pembinaan	sudah ada	Sosialisasi dan pembinaan	OPD	Januari s/d Desember	Pembinaan oleh OPD tim dan penyediaan anggaran
11) Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	Sosialisasi dan pembinaan	sudah ada	Sosialisasi dan pembinaan	OPD	Januari s/d Desember	Pembinaan oleh OPD tim dan penyediaan anggaran
12) Terbentuknya Administrasi Pemerintahan nagari serta meningkat SDM aparatur nagari	Sosialisasi dan pembinaan nagari	sudah ada	monitoring dan evaluasi serta sosialisasi	OPD	Januari s/d Desember	Pembinaan oleh OPD tim dan penyediaan anggaran
13) Pembinaan Keuangan Pemerintahan nagari	Sosialisasi dan pembinaan nagari	sudah ada	monitoring dan evaluasi	OPD	Januari s/d Desember	Pembinaan oleh OPD dan penyediaan anggaran
14) Terlaksananya Permasalahan Pemerintahan Nagari	Sosialisasi dan pembinaan nagari	sudah ada	monitoring dan evaluasi	OPD	Januari s/d Desember	Pembinaan oleh OPD dan penyediaan anggaran
15) Terjadinya Regulasi pemerintahan	Sosialisasi dan pembinaan nagari	sudah ada	monitoring dan evaluasi	OPD	Januari s/d Desember	Pembinaan oleh OPD dan penyediaan anggaran
16) Tertangani masalah masalah nagari	Pembinaan dan Monitoring	sudah ada	monitoring dan evaluasi	OPD	Januari s/d Desember	Pembinaan oleh OPD dan penyediaan anggaran
17) Meningkatkan Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari	Pelatihan BinteK, Monitoring dan evaluasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari	sudah ada	Monitoring dan Evaluasi	OPD dan Tim Kopetensi	Januari s/d Desember	pembinaan oleh Tim dan penyedia Anggaran
18) terlaksananya rapat koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan(PKP)	Sosialisasi dan Pembinaan	sudah ada	Sosialisasi dan Pembinaan	Tim OPD	Januari s/d Desember	Pembinaan terhadap lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
19) meningkatnya pengetahuan masyarakat di nagari dalam mengelola potensi perekonomian yang tersedia di	Sosialisasi, fasilitasi pembentukan serta monev posyanteK dan studi banding serta mengikuti gelar TTG Tk. Provinsi dan nasional	sudah ada	monitoring dan evaluasi	Tim OPD	Januari s/d Desember	Pembinaan dan Penyediaan Anggaran

20	zui berdayanya lembaga 1P PKK Kabupaten dengan jalan pembinaan PKK Kecamatan,Dasa wisma, posyandu,HKG PKK dan	pelatihan,sosialisasi, bimtek,monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	sudah ada	monev dan pembinaan	OPD dan pengurus PKK Kab.	januari s/d desember	pembinaan dan penyediaan anggaran
21	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	pelatihan,sosialisasi, bimtek,monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	sudah ada	monev dan pembinaan	OPD dan TA (Tenaga Ahli), PD (Pendamping Desa, PLD (Pendamping Lokal Desa)	januari s/d desember	pembinaan dan penyediaan anggaran
22	Terlaksananya dan diperolehnya Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Propinsi	pelatihan,sosialisasi, bimtek,monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	sudah ada	monev dan pembinaan	OPD dan Pemerintahan Nagari dan Masyarakat	januari s/d desember	pembinaan dan penyediaan anggaran
23	Terlaksananya sosialisasi nagari adat dan pembinaan KAN	pelatihan,sosialisasi,	sudah ada	monev dan pembinaan	OPD dan Pemerintahan Nagari dan Masyarakat	januari s/d desember	pembinaan dan penyediaan anggaran

Keterangan :

1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempurnaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
4. Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5. Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6. Kolom 6 Cukup jelas
7. Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut



INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Keluarga yang berkualitas	Pelatihan Bimtek, Monitoring dan Evaluasi	Surat edaran, Papan Informasi, Pumflet	Bidang PP & KB	PKB/PLKB, Kader Poktan, masyarakat	Feb - Des 2020
2	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	surat permintaan alat/obat kontrasepsi dan side effect pelayanan KB	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Bulan Mei, Juli, Agustus dan Oktober 2020
3	Tersedianya sarana prasarana program KKBPK	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	pertemuan sinkronisasi dan harmonisasi DAK fisik dan BOKB	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Bulan Agustus 2020
4	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bekerjasama dengan mitra terkait (IBI, TNI, PKK)	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	pertemuan sinkronisasi dan harmonisasi pertemuan koordinasi pelaksanaan DAK bidang KB	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Koordinasi Bulan Maret 2020, sinkronisasi dan harmonisasi Bulan Agustus 2020
5	Terlaksananya pergerakan kampung KB	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	pertemuan sinkronisasi dan harmonisasi pertemuan koordinasi pelaksanaan DAK bidang KB	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Koordinasi Bulan Maret 2020, sinkronisasi dan harmonisasi Bulan September 2020
6	Terlaksananya KIE	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	pertemuan sinkronisasi dan harmonisasi pertemuan koordinasi pelaksanaan DAK bidang KB	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Koordinasi Bulan Maret 2020, sinkronisasi dan harmonisasi Bulan September 2020
7	Terlaksananya Pembinaan Kader KB	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	pertemuan sinkronisasi dan harmonisasi pertemuan koordinasi pelaksanaan DAK bidang KB	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Koordinasi Bulan Maret 2020, sinkronisasi dan harmonisasi Bulan September 2020
8	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana di DAK Fisik KB	koordinasi dengan BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk percepatan petunjuk operasional DAK Fisik dan BOKB	pengajuan pergeseran anggaran	Bidang PP & KB	BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Bulan Februari 2020

9	Terpilihnya Wali nagari dan Bamus	socialisasi dan pembinaan nagari	spanduk, papan informasi, surat edaran	Bidang Nagari	Wali nagari dan masyarakat dinagari tersebut	Januari S/d Desember
10	Terlaksananya Pemilihan Duta Gendre	Socialisasi dan pembinaan	Socialisasi dan pembinaan	Bidang PP & KB	Duta Gendre	Januari S/d Desember
11	Tertibnya Adminitrasi Pemerintahan Nagari dan Meningkatkan SDM Perangkat Nagari	socialisasi dan pembinaan nagari	Surat edaran, Spanduk, WA	Kementrian, OPD Prinsip, Bidang Nagari	Wali Nagari dan Perangkat	Januari S/d Desember
12	Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati	Koordinasi deng DPMD Propinsi	Peraturan Bupati	Kementrian, OPD Prinsip, Bidang Nagari	Wali Nagari dan Perangkat	Januari S/d Desember
13	Penyelesaian Konflik Nagari	Koordinasi dengan kecamatan dan TIM Penyelesaian masalah Nagari	Rapat Rapat koordinasi	Kementrian, OPD Prinsip, Bidang Nagari	Wali Nagari dan Perangkat	Januari S/d Desember
14	Meningkatnya Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari	Pelatihan BinteK, Monitoring dan evaluasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari	SK Bupati dan SK tim OPD	BAPPEDA, Kabid Pemberdayaan SDA, UEM dan PKP, Kasi Usaha Ekonomi Masyarakat, Tenaga Pendamping Desa	Nagari dan Kecamatan	Januari s/d september
15	terlaksananya rapat koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan(PKP)	socialisasi dan Pembinaan	SK Bupati tentang Kawasan Pembangunan Kawasan Perdesaan, SK tim Pembinaan terpadu OPD	BAPPEDA, Kabid Pemberdayaan SDA, UEM dan PKP, Kasi PKP, Tenaga Pendamping Pembangunan Kawasan Perdesaan	Nagari dan Kecamatan	Januari s/d Desember
16	Tertangani masalah masalah nagari	Ombinaan	SK Bupati tentang Penyelesaian Masalah Nagari	OPD	Nagari dan Kecamatan	Januari s/d Desember
17	Meningkatnya Kapasitas Badan Usaha Milik Nagari	Pelatihan BinteK, Monitoring dan evaluasi dan pembinaan Badan Usaha Milik Nagari	SK Bupati	OPD	Nagari dan Kecamatan	Januari s/d Desember
18	terlaksananya rapat koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan(PKP)	socialisasi dan Pembinaan	Socialisasi dan Pembinaan	OPD dan Bidang SDA DAN UEM	Nagari dan Kecamatan	Januari s/d Desember
19	Berdayanya lembaga TP PKK Kabupaten dengan Jalan pembinaan PKK Kecamatan, Dasa wisma, posyandu, HKG PKK dan UP2K	pelatihan, socialisasi, binteK, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	Surat edaran, spanduk	Kasi kelembagaan adat dan sosbud	TP PKK kabupaten, kecamatan dan nagari	1 tahun
20	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	pelatihan, socialisasi, binteK, monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	Surat edaran, spanduk	Kasi Kelembagaan Masyarakat	TA (Tenaga Ahli), PD (Pendamping Desa, PLD (Pendamping Lokal Desa)	1 tahun

21	Meningkatnya Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Nagari dan terlaksananya Penilaian dan Pencanangan dan Penilaian BBGRM Serta HKG PKK Tk.Kabupaten,Provinsi dan Nasional	pelatihan,sosialisasi, bimtek,monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	Surat edaran,spanduk	Kasi Partisipasi Masyarakat	OPD,Pemerintahan Nagari dan Masyarakat	1 tahun
22	Terlaksananya dan diperolehnya Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Propinsi	pelatihan,sosialisasi, bimtek,monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	Surat edaran,spanduk	Kasi Partisipasi Masyarakat	OPD,Pemerintahan Nagari dan Masyarakat	1 tahun
23	Terlaksananya dan diperolehnya Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Propinsi	pelatihan,sosialisasi, bimtek,monitoring dan evaluasi dan studi implementasi	Surat edaran,spanduk	Kasi Partisipasi Masyarakat	OPD,Pemerintahan Nagari dan Masyarakat	1 tahun

Keterangan:

1. Kolom 3 : Diisi dengan Informasi Pengendalian yang ingin disampaikan
- 2 Kolom 4 : Diisi dengan Bentuk dan Sarana komunikasi yang akan digunakan untuk penyampaian informasi seperti Laporan, Surat, Rapat, lainnya
- 3 Kolom 5: Diisi dengan Kepala Satuan Kerja, Kabag/Kabid, Kelompok Pegawai (nama unit kerja), baik internal maupun eksternal
- 4 Kolom 6 : Diisi dengan saat tertentu, periodik mingguan/bulanan/tahunan

